Pranatan Anyar

KR-Driyanto

Pelaku UMKM mengikuti pelatihan marketing digitalisasi.

BERSIASAT DI TENGAH PANDEMI

Pelaku UMKM Dilatih Marketing Digital

BANYUMAS (KR) - Untuk tetap mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, Selasa (24/11) menggelar pelatihan aplikasi marketing digital untuk memasarkan produk UMKM.

Kegiatan yang diikuti 40 pelaku UMKM perwakilan 27 kecamatan dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Aspikmas) itu digelar di Aula Kantor Disnakerkop dan UKM Banyumas.

"Tujuan pelatihan untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM tentang pemasaran di era digital," kata Kepala Disnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono.

Diharapkan para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan marketing digital, nantinya akan mentransfer ilmunya kepada pelaku UMKM lainnya. Menurut Joko, pada masa pandemi Covid-19 ini banyak pelaku UMKM yang masih bisa bertahan, terutama pelaku UMKM dalam produk makanan, kaos, herbal, dan gula semut. Mereka selama ini dalam pemasaran didukung aplikasi digital. Di Banyumas saat ini ada 62.572 pelaku UMKM dan mereka masih eksis di tengah pandemi Covid-19. **(Dri)-d**

DINKES SLEMAN

Tambah Faskes Darurat Covid-19

SLEMAN (KR) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman berencana menambah fasilitas kesehatan (faskes) darurat penanganan pasien Covid-19. Namun penggunaan bangunan milik Kemendagri di Kalasan urung dilakukan dan akan menggunakan bangunan milik Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Jalan Ringroad Barat, Gamping, Sleman.

Menurut Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, wacana ini sudah didiskusikan melalui webinar dan video conference dengan pihak Unisa. Pada prinsipnya bangunan tersebut sebenarnya memang digunakan untuk isolasi bagi warga Muhammadiyah. Namun setelah berkoordinasi dengan Dinkes Sleman, Unisa tidak keberatan menerima warga umum yang harus melakukan isolasi.

"Yang Kantor Kemendagri di Kalasan justru belum ada progresnya. Sedangkan bangunan milik Unisa itu kapasitasnya 50 kamar dengan satu kamar berisi dua bed, sehingga jika dioptimalkan kapasitasnya mencapai 100," kata Joko di kantornya, Rabu (25/11).

Disinggung soal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) jika bangunan milik Unisa mulai diaktifkan, Joko mengaku akan memobilisasi petugas dari Puskesmas. Unisa juga menyediakan petugas, namun hanya 5-6 petugas saja. Jumlah itu dinilai belum mencukupi jika dibagi tiga shift, pagi, sore dan malam. Minimal dibutuhkan 8 petugas di faskes darurat milik Unisa tersebut. "Kami akan rekrut relawan lagi. Kemungkinan memobilisasi teman-teman dari Puskesmas, dijadwalkan dari wilayah lain juga," ungkap Joko.

Rektor Unisa Warsiti SKp MKep SpMat menambahkan, saat ini sedang diinisiasi kerja sama dengan Pemkab Sleman dalam hal ini Dinkes Sleman tentang Pesantren Covid-19 Muhammadiyah di Asrama Unisa Yogyakarta. Pesantren ini merupakan tempat isolasi untuk orang tanpa gejala (OTG). "Penyelenggaraan Pesantren Covid-19 Muhammadiyah yang bertempat di Unisa ini diketuai oleh MCCC PWM DIY bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Gamping dan Unisa Yogyakarta," bebernya. **(Aha)-d**

SURVEI KEKERASAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Perempuan Berpendidikan Tinggi Pilih Diam

YOGYA (KR) - Angka kekerasan terhadap perempuan dalam pelbagai bentuk selama masa pendemi Covid-19 diprediksi meningkat. Ironisnya, perempuan berpendidikan tinggi minimal S1 hingga pacasarjana, lebih memilih diam ketika mengalami kekerasan. Bahkan sikap diam saja atau memberitahukan hanya kepada saudara, teman dan/atau tetangga ternyata juga merupakan pilihan yang berstatus menikah dan tidak menikah. Memang yang berstatus menikah persentasenya lebih tinggi, sekitar 14 persen.

"Jika dijumlah dari seluruh tingkat pendidikan, mereka yang memilih diam mencapai 78 persen. Sementara, 77 persen menjawab hanya memberi tahu kerabat terdekat," tandas Komisioner Komnas Perempuan yang juga Ketua LPA PP Aisyiyah Alimatul Qibtiyah PhD, Rabu (25/11), saat menyampaikan hasil survei kekerasan selama masa pandemi Covid-19. Pertemuan mengawali rangkaian Peringatan Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang berlangsung hingga 10 Desember, di antaranya terdapat Peringatan Hari AIDS Sedunia, Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hari HAM Internasional dan lainnya.

Karena ini survei, sebut Alimatul, menukikkan sampai pada alasan mengapa korban memilih diam, sehingga apa sebab korban terlebih yang berpendidikan tinggi memilih diam, tidaklah tereksplore. "Hanya saja saya melihat, belum adanya payung hukum yang komprehensif menjadi alasan utama. Dan angka yang kemudian muncul bahwa 78 persen korban memilih diam, kian menguatkan asumsi bila angka kekerasan terhadap perempuan fenomena gunung es. Dimana data dan angka yang ada dan tersedia hanyalah data yang terlaporkan," ujarnya. **(Fsy)-d**

Terdampak Pandemi, 120 Klomtan Terima Bantuan

TEMANGGUNG (KR) - Pemkab Temanggung mengucurkan dana hibah senilai Rp 3 miliar dari APBD Perubahan 2020 untuk 120 kelompok tani (klomtan) terdampak pandemi Covid-19.

Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, bantuan untuk memberikan stimulus dalam permodalan selain mendorong pergerakan perekonomian riil di tingkat masyarakat. "Bantuan hibah ini untuk meringankan petani dalam mencukupi kebutuhan melaksanakan usaha tani selanjutnya," kata Al Khadziq di sela penyerahan bantuan hibah sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani terdampak Covid-19, Selasa (24/11).

Al Khadziq berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya, dioptimalkan pemanfaatannya. Sedangkan kepada seluruh kelompok penerima manfaat segera merealisasikan rencana pembelian sebagaimana yang sudah tertuang dalam RAB di proposal yang telah diajukan. "Bantuan segera manfaatkan dan sebagai konsekuensinya harus tertib administrasi, segera pula membuat laporan pemanfaatan bantuan hibah," katanya.

Bupati mengatakan, dampak pandemi begitu luas, sejumlah negara telah mengalami resesi, demikian pula perekonomian dalam negeri mengalami pertumbuhan negatif di Kuartal II dan III ini.

Di Temanggung yang merupakan daerah agraris, dimana mayoritas masyarakat menjadi pelaku usaha di bidang pertanian dalam arti luas, dampak tersebut demikian terasa, terutama dalam penurunan harga komoditas pertanian. **(Osy)-d**

2.708 VAKSINATOR DISIAPKAN

Jateng Dapat Alokasi 21 Juta Dosis Vaksin

SEMARANG (KR) - Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan, Pemprov Jateng akan menerima 21.525.000 dosis vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, Dinkes Jateng mempersiapkan 2.708 vaksinator yang sudah dilatih.

"Alokasi vaksin Covid-19 untuk Jawa Tengah sebanyak 21 juta dosis lebih. Alokasi tersebut berdasarkan perhitungan jumlah sasaran di Jateng yang jumlah penduduknya sekitar 35 juta jiwa. Nanti akan ada webinar tentang vaksin bersama Kemenkes," ujar Yulianto Prabowo di Semarang, Rabu (25/11).

Terkait alokasi vaksin tersebut, akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas distribusi vaksin yang akan dilakukan bertahap.

Ia menyebutkan, sasaran vaksin adalah penduduk berusia 18-59 tahun. Distribusinya sesuai kelompok-kelompok sasaran tertentu. Terkait merek vaksin, Yuli menyebut hal itu tergantung keputusan Pemerintah Pusat, karena Dinkes Jateng tidak membeli vaksin tersebut secara mandiri.

Sedangkan terkait tempat penyimpanan vaksin, Dinkes Jateng sedang mempersiapkan, karena vaksin harus disimpan dalam ruangan yang bersuhu minus 20-40 derajat Celsius.

Terkait vaksinator, Yuli menyebut sudah ada 2.708 orang yang dilatih. Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan yang dapat melayani penyuntikan vaksin sekitar 1.228 unit. "Jumlah itu bisa berkembang, karena vaksinnya tidak langsung, tapi bertahap," ungkap Yuli.

Mengenai keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19, hingga 23 November 2020 sudah terpakai 75 persen. Dari jumlah tempat tidur sebanyak 5.124, terpakai 3.889 unit, sementara yang tersisa masih 1.235 unit. Untuk keterisian tempat tidur ICU, sudah terisi 62 persen. Dari 402 unit tempat tidur, terpakai 253 unit dan 149 unit lainnya masih kosong.

Menurut Yulianto, kondisi tersebut merata di seluruh Jateng, namun ada pula yang masih kosong. Untuk menyiasatinya, Dinkes Jateng menggunakan sistem rujukan elektronik untuk mengarahkan pasien ke tempat tidur yang kosong.

Secara teknis, penambahan tempat tidur isolasi maupun ICU bisa dilakukan sesegera mungkin, karena manajemen rumah sakit cukup mengubah fungsi tempat tidur umum, menjadi perawatan Covid-19.

Yulianto Prabowo mengatakan, hingga Selasa (24/11), jumlah kasus Covid-19 di Jateng sebanyak 7.162 kasus, 48 persen dirawat dan 52 persen lainnya isolasi mandiri. **(Bdi)-d**

DI SAMPING KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE

Orangtua Penentu Keputusan Masuk Sekolah

JAKARTA (KR) - Kepala sekolah, Komite Sekolah dan orangtua menjadi penentu keputusan anak didik bisa masuk sekolah Januari 2021. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, ada tiga poin penting dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait pemberlakuan sekolah tatap muka Januari 2021 pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11), Mendikbud menyampaikan, keputusan membuka sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka harus mendapatkan keputusan tak hanya dari Pemda, tapi juga kepala sekolah dan Komite Sekolah yang dalam hal ini adalah perwakilan orangtua.

Jika mereka tidak memperkenankan, maka sekolah tidak bisa dibuka. "Jika orangtua khawatir kondisi anak di sekolah, maka sekolah tak bisa memaksanya apabila orangtua tidak mengizinkan," kata Nadiem.

Poin berikutnya, sekolah yang sudah dibuka, kondisinya akan sangat berbeda dari kondisi sebelum adanya pandemi. Misalnya, kapasitas murid hanya 50 persen atau 18 siswa perkelas. Secara otomatis, sekolah harus menerapkan sistem belajar mengajar bergantian atau shift. "Secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi minimal dua shift. Masker wajib, tak ada kantin, ekstrakurikuler, olahraga. Ini bukan sekolah normal," tandas Mendikbud.

Adapun saat ini sudah berjalan pembukaan sekolah untuk zona hijau dan kuning, setidaknya selama dua bulan. Sekolah-sekolah ini, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Zona hijau 73 persen, zona kuning 20-25 persen yang tatap muka. Ini akan makan waktu, persiapan sekolah, *hand sanitizer, thermogun*, ada akses ke berbagai tempat kesehatan. Jika ada infeksi, sekolah harus langsung ditutup," tegasnya. **(Ati)-d**

UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DIY

Kemenkes Setujui Usulan Penambahan Nakes

YOGYA (KR) - Kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ternyata berbanding terbalik dengan tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada di rumah sakit. Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY akan menambah 251 tenaga bantu di bidang kesehatan khusus untuk menangani Covid-19.

Jumlah nakes bantu tersebut berdasarkan analisis situasi yang dilakukan Dinkes DIY terkait kasus Covid-19. Ke-251 nakes itu terdiri dua dokter spesialis paru, enam dokter umum, dua petugas epidemiologi, 236 perawat dan lima radiolog. Usulan tersebut sudah disetujui Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

"Pemda DIY tinggal menyediakan tempat saja. Diputuskan, mereka akan kita tempatkan di RSUP Dr Sardjito, RSA UGM dan RSPAU Dr S Hardjolukito. Ini menjadi bagian optimalisasi dalam penanganan kasus Covid-19 di DIY," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY Tresno Agung Wibowo dalam Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY dengan tema 'Strategi Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19 di DIY', Rabu (25/11).

Penambahan tenaga medis ini, dijelaskan Tresno, karena adanya tren kenaikan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi saat ini muncul klaster baru, yakni pondok pesantren dan instansi atau perkantoran. Itu yang harus diwaspadai dan menjadi perhatian masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena hal tersebut yang bisa menekan kasus Covid-19.

"Untuk itu, mereka kita prioritaskan ke tiga rumah sakit tersebut dan memang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Contohnya untuk perawat. Dalam sehari mereka shiftnya dibagi tiga kali. Ini juga menegaskan, jika *bed* masih tersedia. Hanya memang trennya ada kenaikan," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta Pemda DIY dalam hal ini Satgas Covid-19 untuk memaksimalkan pelayanan. Bisa dilakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kesehatan, agar bisa menjadi relawan. Tentu saja, tetap mendapatkan insentif yang sesuai. **(Awh/Bro)-d**

DI LOKASI PENGUNGSIAN MERAPI

Pastikan Prokes Tetap Berjalan

YOGYA (KR) - Penegakan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar untuk mencegah penularan Covid-19. Tidak hanya di fasilitas publik atau perkantoran, tetapi di lokasi pengungsian warga lereng Gunung Merapi protokol kesehatan juga harus tetap berjalan dengan baik.

Untuk mengoptimalkan layanan dan memastikan kesehatan warga di barak pengungsian, Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terus berkoordinasi. "Untuk pengungsi Merapi, sesuai kewenangan Dinkes DIY melakukan monitor atau pendampingan. Saat ini pengungsi dalam kendali Posko Kesehatan Sleman. Meski begitu masyarakat tidak perlu khawatir, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) berjalan dengan baik, demikian juga dengan Dinkes DIY, sudah dilaksanakan termasuk bantuan masker dan vitamin bagi pengungsi," kata Kepala Dinkes DIY drg Pembajun Setyaningastutie MKes, Rabu (25/11).

Menurut Pembajun, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah para pengunjung dan atau relawan dari luar Sleman. Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, harus dipastikan mereka dalam keadaan sehat. "Sebab mayoritas warga yang ada di pengungsian kelompok rentan seperti lansia, balita dan ibu hamil. Untuk itu penegakan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dan disiplin," tandasnya.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyampaikan, kasus positif maupun kasus sembuh dari Covid-19 di DIY sama-sama bertambah sangat signifikan. Kasus positif bertambah 150 kasus menjadi 5.453 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah 144 menjadi 4.141. Tambahan kasus terkonfirmasi positif mayoritas berdomisili di Sleman sebanyak 121 orang, disusul Kota Yogyakarta 13 orang, Bantul delapan orang, Kulonprogo lima orang dan Gunungkidul tiga orang. **(Ria/Ira)-d**

Pokjaluh Agama Islam Peduli Covid-19

KR-Febriyanto

Penyerahan bantuan dari Pokjaluh Agama Islam Kemenag DIY.

BANTUL (KR) - Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam Kementerian Agama DIY menyelenggarakan bakti sosial Peduli Covid-19 di Ponpes Ali Maksum Krapyak Panggungharjo, Sewon, Bantul, Rabu (25/11). "Kegiatan ini wujud kepedulian kami kepada pihak-pihak yang terdampak pandemi ini," kata Ketua Pokjaluh Agama Islam Kemenag DIY Jafar Arifin.

Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, buah, sayuran, hand sanitizer, sabun cuci, vitamin dan masker. "Besar harapan kami semoga pengasuh, ustadz, pengurus dan segenap santri selalu sehat," harap Jafar.

Secara simbolis, bantuan diterima salah satu pengasuh, Ustadz Basyir. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pokjaluh Agama Islam Kemenag DIY. "Bantuan ini sangat bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan barokah kepada Pokjaluh Kemenag DIY," katanya.

Penyerahan bantuan disaksikan Ketua Pokjaluh Kulonprogo Wardani SAg, Ketua Pokjaluh Bantul Sri Sumiyatun SAg serta Ketua Pokjaluh Kota Yogyakarta Suprapto SAg. **(Feb)-d**